

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan dari Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Lembaga Masyarakat desa Hutan (LMDH) Giri Wanasakti Desa Tahunan, Kecamatan Sale. Hasil kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini dimulai dari dua proses yaitu proses penyusunan serta keterlibatan dari sumber daya yang menangani kebijakan ini.

Proses penyusunan dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini adalah sebagai tidaklanjut Surat Keputusan Bupati Rembang No 116 tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Rembang. Kemudian sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Perhutani setempat untuk mengintruksikan kepada seluruh

desa pemangku hutan yang ada dikabupaten rembang melalui Kepala Seksi di Bidang Kehutanan lalu diteruskan kepada kepala Desa. Selain itu sumber daya yang dilibatkan dalam kebijakan ini adalah sumber daya peralatan serta sumberdaya anggaran.

## 2. Dampak Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan.

### a) Secara Ekonomi

Dampak ini adalah tujuan yang ingin dicapai untuk jangka panjang, secara ekonomi ini adalah adanya nilai tambah ekonomi masyarakat dari tanamana produktif yang dimanfaatkan. Serta pemanfaatan dari warga dengan menggunakan lahan bekas tebangan, hal tersebut sesiau dengan warga yang memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam padi, kedelai, dan jagung. Hasilnya warga bisa menjual padi, kedelai, dan jagung untuk kebutuhan sehari-hari.

### b) Secara Sosial

Dampak sosial dari Kebijakan ini dapat diketahui dari tumbuhnya rasa sosial masyarakat karena memang Kebijakan ini adalah Kebijakan yang sifatnya partisipatif. Rasa sosial ini dapat dilihat dari tumbuhnya rasa gotong-royong dalam kegiatan Desa melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini setiap tahunnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

### c) Secara Lingkungan

Ada perubahan secara nyata di lingkungan Desa Tahunan sendiri, khususnya yang ada di pinggir jalan yang sebelum Kebijakan ini jalan nyaris gundul akibat penjarahan mulai tahun 1998-2005 sebelum adanya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini kemudian di tahun 2006 ini sudah sangat berubah dengan banyaknya tumbuh tanaman jati baik itu di kawasan pinggir hutan serta di lahan-lahan bekas jarahan.

3. Dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini telah didapat manfaat oleh Desa Tahunan, hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen yang terlibat di dalam Kebijakan ini baik itu faktor internal maupun eksternal, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### A. Internal

##### a) Sumber daya Manusia

Dalam hal ini banyak sumber daya manusia yang mendukung kelancaran Kebijakan tersebut, baik itu dari Aparatur Desa mulai dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab, kemudian terbentuknya organisasi untuk melaksanakan Kebijakan ini, serta dukungan masyarakat umum, kepedulian serta antusiasme yang tinggi menjadi point positif di dalam pelaksanaan Kebijakan ini.

b) Lokasi

Pelaksanaan Kebijakan ini sangat terbantu karena Desa mereka memiliki tanah pangkuan hutan yang cukup luas, penunjang berjalannya Kebijakan ini dengan lancar.

c) Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Tahunan yang sebagian besar adalah Petani, dan bekerja sebagai buruh tani adalah salah satu aset di dalam kelancaran pelaksanaan Kebijakan tersebut. Karena dengan pemahaman mereka terkait dengan bagaimana merawat serta menumbuhkan kembangkan tanaman ini menjadi modal di dalam keberhasilan pelaksanaan Kebijakan ini.

B. Eksternal

a) Dukungan dari pemerintah Daerah baik itu ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten serta dukungan dari KPH setempat di dalam mensukseskan Kebijakan ini, melalui dukungan Dana, Pengawasan, serta sosialisasi secara berkala dan Pemberian bibit tanaman.

Selain beberapa dukungan yang ada Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini di dalamnya juga terdapat beberapa Hambatan antara lain:

A. Faktor Internal

a) Aktivitas masyarakat terkait dengan tingkat antusiasme masyarakat yang berbeda di dalam merawat atau menumbuhkan

kembangkan tanaman yang telah ditanam, sehingga perkembangan tanaman menjadi terhambat serta tingkat pemerataan tanaman yang ditanam menjadi berkurang karena dengan perawatan yang kurang tanaman menjadi mati.

- b) Sarana dan Prasarana dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Tahunan, yang menjadi faktor penghambat dari sarana dan prasarana adalah faktor jalan yang masih kurang baik bagi warga untuk menuju hutan.

#### B. Faktor Eksternal

##### a) Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan ini sangat kurang, hanya terjadi pada saat pemberian tanaman, namun pada saat perawatan tanaman pemerintah kurang melakukan pengawasan.

#### B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan diatas dan dari hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi Desa Tahunan dalam upaya untuk menerapkan Kebijakan Pengalolaan Hutan Bersama Masyarakat. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaanya untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat maka kebijakan ini sebaiknya dijalankan setiap periode

tertentu sesuai kesepakatan yang dimusyawarahkan secara bersama-sama.

2. Untuk lebih meningkatkan hasil kebijakan ini dari segi ekonomi sebaiknya dana dari hasil sharing digunakan untuk menambah usaha-usaha masyarakat, apabila selama ini hanya ada tiga usaha dalam LMDH Giri Wana Sakti sebaiknya diperbanyak lagi usaha-usaha yang mendidik, sebagai contohnya pembudidayaan tanaman produktif, hal ini selain juga menambah nilai ekonomi juga menambah aspek sosial, karena masyarakat akan bergotong royong dalam menjalankan usaha ini, selain dari aspek lingkungan usaha dari tanaman produktif tersebut juga bisa membuat lingkungan sekitar menjadi lebih hijau lagi.
3. Harus ada sosialisasi serta komunikasi dari kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat untuk menyamakan keinginan atau persepsi dalam menjalankan kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan ini, agar kebijakan ini dapat dijalankan secara bersama-sama.